

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Rosi Yunita¹, Fitriyani Yuliawati², Riska Sarofah³

¹ Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya,

² Universitas Siliwangi

³ Universitas Siliwangi

rosi.yunita14@gmail.com, fitriyaniyuliawati@unsil.ac.id, riskasarofah@unsil.ac.id

*Email Korespondensi: rosi.yunita14@gmail.com

Abstract:

Abstract: This study aims to analyze the Tasikmalaya Regency government's policy in improving the quality of education towards Golden Indonesia 2045. Education has a strategic role in forming superior human resources as the main foundation of regional development. Tasikmalaya Regency as one of the regions with great potential in West Java faces various challenges in improving the quality of education, including the still low achievement of Average Years of Schooling. This study aims to analyze the actual condition of education in Tasikmalaya Regency, identify problems and their root causes, and develop effective and sustainable policy strategies in order to improve the quality of education towards Golden Indonesia 2045. The study uses a qualitative-descriptive approach with a policy analysis method. The data used are secondary data from literature reviews and literature studies. The results of the study indicate that increasing the average school as an effort to improve the quality of education in Tasikmalaya Regency requires an integrated policy based on five main pillars: (1) Equitable Access and Educational Infrastructure; (2) Strengthening Family Economic Support; (3) Prevention and Handling of School Dropouts; (4) Relevance of Education to the World of Work; and (5) Strengthening Educational Governance and Policy. The implementation of this strategy is expected to encourage educational transformation in Tasikmalaya Regency that is inclusive, adaptive, and quality-oriented, so that Tasikmalaya Regency can contribute optimally in realizing Golden Indonesia 2045.

Keywords: Quality of Education; Average Years of Schooling; Education Policy Strategy; Golden Indonesia 2045

Abstrak:

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan kualitas Pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia unggul sebagai fondasi utama Pembangunan daerah. Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah dengan potensi besar di Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas pendidikan, diantaranya masih rendahnya pencapaian Rata-rata Lama Sekolah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aktual pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya, mengidentifikasi permasalahan dan akar penyebabnya, serta merumuskan strategi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan

metode analisis kebijakan (policy analysis). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari kajian Pustaka dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya memerlukan kebijakan yang terintegrasi berbasis lima pilar utama: (1) Pemerataan Akses dan Infrastruktur Pendidikan; (2) Penguatan Dukungan Ekonomi Keluarga; (3) Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah; (4) Relevansi Pendidikan dengan Dunia Kerja; serta (5) Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan Pendidikan. Implementasi strategi ini diharapkan dapat mendorong transformasi pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada mutu, sehingga Kabupaten Tasikmalaya dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Kualitas Pendidikan; Rata-rata Lama Sekolah; Strategi Kebijakan Pendidikan; Indonesia Emas 2045;

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan indikator dalam penguatan fondasi pertumbuhan individu dalam membentuk identitas bangsa. Secara fundamental kemajuan Masyarakat harus ditandai dengan Kesehatan, kesejahteraan dan Masyarakat yang berkeadilan (Samala, A. D., dkk, 2024). Indonesia sedang bertransformasi untuk menjadi negara maju dengan visi Indonesia emas 2045. Beberapa tantangan dalam pembangunan masih menjadi tantangan, misalnya kualitas guru yang masih belum merata, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman, maupun infrastruktur yang belum merata (Rosani, M., dkk, 2025).

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Hal tersebut sejalan dengan Visi Presiden 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dicapai melalui salah satu Misi ASTA CITA, dengan Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Serta salah satu dari 17 program prioritas Presiden, yaitu Penguatan Pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi. Kabupaten Tasikmalaya juga menetapkan visi dan misi yang selaras, yaitu Mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, berakhlak serta berbudaya.

Menurut 21st century skills theory bahwa pengembangan keterampilan yang relevan perlu disesuaikan dengan tuntutan Masyarakat dan kebutuhan pasar. Teori ini menekankan gagasan pengembangan keterampilan global, pemikiran kritis dan inovatif (Syahriani, F., & Ferdi Yufriadi, F, 2023). Menurut Pasaribu, dkk (2013) bahwa perlu adanya keterampilan yang relevan sesuai dengan tuntutan global. Upaya mewujudkan generasi emas Indonesia Tahun 2045 sangat tergantung dari kualitas dan mutu penyelenggaraan Pendidikan. Dalam hal ini, guru sebagai peran kunci pelaku dalam Pendidikan, sehingga keberhasilannya harus mendapatkan dukungan dari pemerintah dan kurikulum yang mengintegrasikan aspek akademik dan Pembangunan karakter (Amir, A., & Prayoga, S, 2025). Keterlibatan generasi muda juga sangat mendukung penyelenggaraan Pendidikan, faktanya bahwa terdapat 70,72% generasi muda produktif dari total jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, jika dikelola dengan baik maka potensi pertumbuhan ekonomi dan daya saing global sangat mungkin diwujudkan (Pranita, D, dkk, 2025).

Pemerintah meyakini bahwa dengan lahir bonus demografi, maka akan memajukan perekonomian Indonesia tahun 2045. Selain itu generasi emas ditandai dengan generasi yang cakap terhadap teknologi dan inovasi, ketahanan mental, standar moral-spiritual, adaptif terhadap perubahan dan kemampuan menghadapi tantangan. Serta, generasi perlu menunjukkan inovasi, kreativitas, kolaborasi dan Kesehatan terutama kepedulian lingkungan (Rahmawati, I, 2025). Kebijakan Pendidikan yang tepat akan mempengaruhi implementasi terhadap dampak dari bonus demokrasi. Sehingga pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam upaya meningkatkan kemampuan distribusi sumber daya dan adaptif terhadap perkembangan atau perubahan yang terjadi di Masyarakat (Elmi, F., & Librianty, N, 2023). Menurut Hadiningrat dan Silalahi (2024) bahwa pengembangan sumber daya manusia yang unggul memerlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan berbasis kompetensi, dan penguasaan teknologi modern. Pada akhirnya, generasi emas akan menjadi langkah strategis apabila pemerintah memiliki perencanaan dan implementasi yang matang dalam kebijakan yang ditetapkan (Belladonna, dkk, 2023).

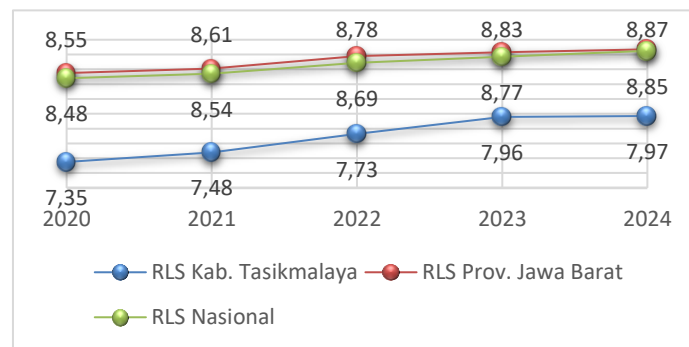
Menurut Easton (1965) pada teori sistem bahwa kebijakan public merupakan bagian dari hasil input-proses dan output dimana tuntutan akan dikonversi oleh Lembaga politik dan menghasilkan kebijakan terutama yang akan berdampak kepada masyarakat. Maka kebijakan

Pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah dalam merespon kualitas Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya.

Salah satu indikator penting yang menggambarkan kualitas pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yang merupakan bagian dari salah satu komponen perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk usia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah serta kualitas sumber data manusianya. Capaian RLS yang tinggi menunjukkan sistem pendidikan berjalan semakin baik (Unesco, 2009). Oleh karena itu, RLS menjadi salah satu indikator yang menjadi sasaran pembangunan dalam RPJMN 2025–2029.

Grafik 1.

Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik RI, 2024.

Nilai RLS Kabupaten Tasikmalaya setiap tahun mengalami peningkatan, namun masih jauh di bawah RLS Provinsi Jawa Barat dan RLS Nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai RLS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 sebesar 7.97 tahun, yang artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tasikmalaya telah menempuh pendidikan selama 7.97 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII SMP/ sederajat.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti penuntasan program wajib belajar 9 tahun, perluasan akses pendidikan, hingga penyediaan beasiswa. Namun, upaya tersebut memerlukan strategi yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan struktural yang menghambat capaian pendidikan.

Kajian ini disusun untuk menganalisis kondisi aktual Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya, mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tasikmalaya serta menawarkan strategi peningkatan RLS yang realistis dan implementatif. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi dan tantangan peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tasikmalaya, serta merumuskan strategi kebijakan yang inovatif, inklusif, dan implementatif guna meningkatkan RLS sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian memiliki kebaruan dalam melihat aspek kebijakan lokal daerah.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis kebijakan (policy analysis). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Tasikmalaya, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan, realistis, dan dapat diimplementasikan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi dan terpercaya, antara lain: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan Dasar dan (Kemendikdasmen), Bappenas, serta Laporan dan dokumen kebijakan seperti Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi dari laporan resmi, publikasi ilmiah, peraturan pemerintah, serta hasil survei pendidikan nasional. Kajian literatur dilakukan untuk memperoleh gambaran teoretis dan empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi RLS serta strategi peningkatannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur (literature review). Studi dokumentasi bertujuan untuk menelusuri isi dan implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan kajian literatur dilakukan untuk memahami teori dan model kebijakan publik yang relevan, seperti model sistem Easton (1965) dan model analisis kebijakan Dunn (2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan konteks analisis kebijakan public, bahwa model analisis kebijakan public menurut Dunn (2018) bahwa terdapat tahapan utama dalam proses kebijakan yaitu: *agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, policy evaluation*, dan *policy termination*. Setiap tahap memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan sesuai tujuan (Dwi, 2024). Misalnya, dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan, proses *agenda setting* menempatkan isu rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai prioritas kebijakan daerah yang membutuhkan solusi strategis.

Berdasarkan data dari BPS, nilai RLS di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan, hal ini dikarenakan akses pendidikan di perkotaan lebih mudah daripada di perdesaan, di perkotaan terdapat lebih banyak sekolah dan perguruan tinggi serta infrastruktur pendidikan yang memadai. Nilai RLS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 termasuk 10 capaian terendah se-Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan capaian RLS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Tabel 1.

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Bekasi	11,16	11,31	11,44	11,66	11,79
2	Kota Depok	11,28	11,46	11,47	11,58	11,59
3	Kota Cimahi	10,96	11,08	11,21	11,39	11,52
4	Kota Bandung	10,75	10,99	11,00	11,06	11,07
5	Kota Bogor	10,33	10,53	10,63	10,64	10,71
6	Kota Cirebon	9,91	10,12	10,33	10,37	10,53
7	Kota Sukabumi	9,59	9,81	10,14	10,37	10,38
8	Bekasi	9,12	9,30	9,53	9,57	9,76
9	Kota Tasikmalaya	9,33	9,52	9,53	9,54	9,63
10	Bandung	8,96	9,07	9,08	9,10	9,15
11	Kota Banjar	8,63	8,77	8,78	8,79	8,83
12	Sumedang	8,51	8,52	8,72	8,73	8,74
13	Bogor	8,30	8,31	8,34	8,37	8,39
14	Bandung Barat	8,19	8,20	8,22	8,23	8,24
15	Purwakarta	8,09	8,10	8,11	8,13	8,14
16	Ciamis	7,70	7,90	8,00	8,09	8,10
17	Pangandaran	7,74	7,85	8,03	8,04	8,10
18	Karawang	7,77	7,78	7,96	8,04	8,05
19	Tasikmalaya	7,35	7,48	7,73	7,96	7,97
20	Kuningan	7,57	7,80	7,88	7,89	7,90
21	Garut	7,52	7,53	7,83	7,84	7,85
22	Cirebon	6,92	7,10	7,40	7,64	7,65
23	Majalengka	7,27	7,31	7,49	7,52	7,53
24	Subang	7,10	7,11	7,20	7,45	7,46
25	Sukabumi	7,07	7,10	7,11	7,33	7,34
26	Cianjur	7,18	7,19	7,20	7,22	7,33
27	Indramayu	6,30	6,52	6,83	6,94	6,95

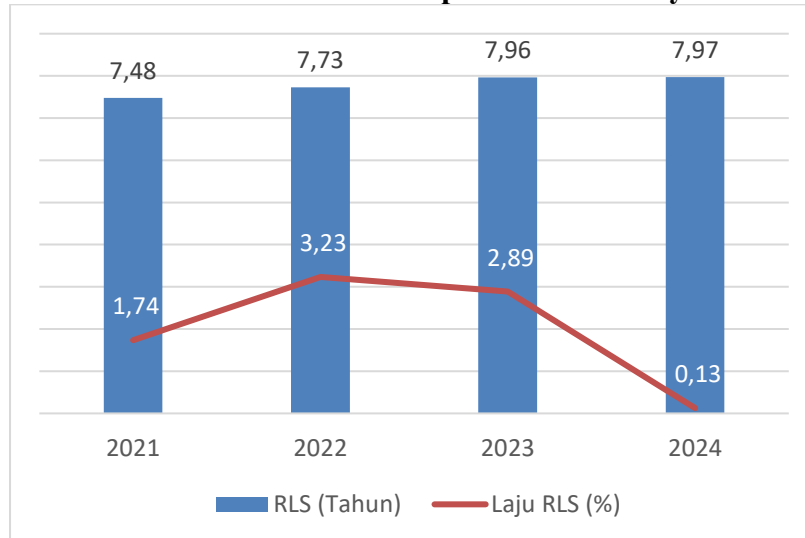
Rosi Yunita

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MENUJU INDONESIA EMAS 2024**

Nilai RLS Kabupaten Tasikmalaya setiap tahun mengalami peningkatan, namun pertumbuhan di tahun 2024 jauh melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan RLS pada tahun 2024 hanya sebesar 0.01 tahun atau 0.13%, yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0.23 tahun atau 2.89% pada tahun 2023. Kenaikan ini juga lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan RLS per tahun selama periode tahun 2020-2024 yang mencapai 2%. Salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan RLS terutama karena masih banyaknya penduduk usia tua yang berpendidikan rendah. Berikut merupakan capaian RLS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2024.

Grafik 2.

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2024

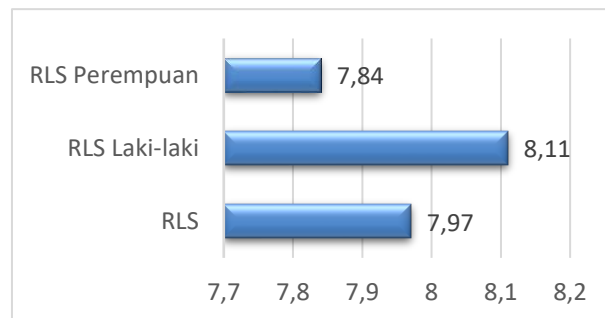


Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya

Nilai RLS tahun 2024 untuk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tasikmalaya terlihat perbedaan yang cukup signifikan. RLS laki-laki di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 8.11 tahun atau memasuki kelas IX SMP/ sederajat, sementara RLS perempuan di Kabupaten Tasikmalaya hanya mencapai 7.84 tahun atau tidak menamatkan kelas VIII SMP/ sederajat. Perbedaan nilai RLS tersebut bisa jadi disebabkan masih terdapatnya kesenjangan gender dalam mengakses pendidikan dan juga masih adanya budaya patriaki yang menganggap bahwa pendidikan bagi perempuan dianggap kurang begitu penting. Berikut merupakan capaian RLS Perempuan dan Laki-laki di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024.

Grafik 3.

Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan dan Laki-laki di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan analisis di atas, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya :

Rosi Yunita

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MENUJU INDONESIA EMAS 2024

1. Kesenjangan Akses Pendidikan Tingkat RLS di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Hal ini disebabkan oleh Keterbatasan sarana prasarana sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar); distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, sehingga mutu pembelajaran berbeda antarwilayah; Akses transportasi dan infrastruktur yang sulit dijangkau, membuat anak-anak di pedesaan kurang terfasilitasi untuk melanjutkan sekolah.

2. Faktor Ekonomi dan Sosial Keluarga Banyak anak dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena Harus bekerja membantu perekonomian keluarga; Keterbatasan biaya meski ada program beasiswa atau bantuan; Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan jangka panjang.

3. Angka Putus Sekolah yang Masih Tinggi Walaupun program wajib belajar 12 tahun telah dicanangkan, realitas menunjukkan angka putus sekolah masih terjadi, terutama di jenjang SMP dan SMA. Penyebabnya meliputi Perkawinan anak usia dini; Kurangnya minat belajar karena kualitas pembelajaran yang rendah; Tekanan sosial budaya di beberapa komunitas yang belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

4. Relevansi Pendidikan dengan Dunia Kerja Sebagian masyarakat menilai sekolah tidak memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan ekonomi. Hal ini menyebabkan sebagian remaja memilih bekerja lebih cepat daripada melanjutkan pendidikan. Kurangnya keterkaitan antara kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja membuat sekolah dipandang tidak relevan bagi sebagian peserta didik.

5. Kelemahan Implementasi Kebijakan Meskipun terdapat berbagai kebijakan seperti Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar, maupun program wajib belajar, implementasinya seringkali belum efektif. Tantangan yang dihadapi antara lain Pendataan siswa yang tidak akurat; Penyaluran bantuan yang lambat atau tidak tepat sasaran; Kurangnya evaluasi dan monitoring program secara menyeluruh.

Dalam upaya meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tasikmalaya, diperlukan berbagai alternatif kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan teoretis dalam kerangka kebijakan publik. Menurut Dye (2013), kebijakan publik merupakan “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan,” yang berarti setiap keputusan pemerintah, termasuk dalam bidang pendidikan, harus berorientasi pada penyelesaian masalah sosial yang nyata. Oleh karena itu, formulasi alternatif kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Alternatif pertama adalah penguatan program wajib belajar dari 12 tahun menjadi 13 tahun, mencakup pendidikan dari jenjang PAUD hingga pendidikan vokasi atau persiapan perguruan tinggi. Kebijakan ini sejalan dengan tahapan *policy formulation* dalam model Dunn (2018) yang menekankan pentingnya desain kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memperluas cakupan wajib belajar, pemerintah dapat meningkatkan standar minimal pendidikan masyarakat dan memastikan lebih banyak lulusan siap kerja atau melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, kebijakan ini juga menuntut kesiapan dari segi anggaran, infrastruktur, dan kualitas tenaga pendidik yang memadai.

Alternatif kedua adalah ekspansi pendidikan vokasi dan keterampilan melalui sistem *link and match* dengan dunia usaha dan industri. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Easton (1965) bahwa kebijakan publik merupakan proses sistemik yang menghubungkan tuntutan masyarakat (input) dengan hasil kebijakan (output). Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja akan menghasilkan *output* berupa peningkatan kompetensi tenaga kerja muda dan pengurangan angka pengangguran. Meski demikian, kebijakan ini membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, dunia industri, dan lembaga pendidikan agar kesenjangan mutu antarwilayah dapat diminimalisasi.

Alternatif ketiga adalah pemberian insentif ekonomi bagi keluarga miskin dalam bentuk *conditional cash transfer* atau bantuan tunai bersyarat. Berdasarkan teori Anderson (2014), kebijakan publik harus bersifat *purposive action*, yakni tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Program insentif ini terbukti efektif menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada akurasi data penerima manfaat serta mekanisme pengawasan yang transparan agar tidak terjadi penyimpangan kebijakan.

Alternatif keempat adalah penguatan pendidikan alternatif dan kesetaraan, seperti program kejar paket, sekolah terbuka, dan pembelajaran berbasis teknologi digital. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan *policy implementation* dalam model Dunn (2018), di mana fleksibilitas pelaksanaan menjadi kunci untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses pendidikan formal. Program ini memberikan kesempatan kedua (*second chance education*) bagi anak putus sekolah, meskipun tantangan utamanya adalah menjaga mutu pembelajaran agar setara dengan sekolah reguler dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik agar adaptif terhadap perubahan teknologi.

Selanjutnya, alternatif kelima adalah pengembangan model pendidikan berbasis komunitas, termasuk pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan formal, keterampilan, dan nilai-nilai budaya lokal. Strategi ini memperkuat relevansi kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat dan menegaskan pandangan Easton (1965) tentang pentingnya *feedback* dalam sistem kebijakan publik, di mana hasil kebijakan yang kontekstual akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Pendidikan berbasis komunitas lebih mudah diterima karena dekat dengan kultur lokal, meski perlu dukungan regulasi dan sistem akreditasi yang jelas untuk menjamin kesetaraan mutu pendidikan antarwilayah.

Dengan demikian, keseluruhan alternatif kebijakan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan RLS di Kabupaten Tasikmalaya memerlukan strategi yang integratif, partisipatif, dan berbasis data. Setiap alternatif harus dianalisis melalui pendekatan rasional sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2018) agar kebijakan yang dipilih tidak hanya solutif secara jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan analisis permasalahan, pembahasan, serta alternatif kebijakan yang tersedia, peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tasikmalaya memerlukan pendekatan kombinatorik, tidak hanya memilih satu opsi kebijakan, melainkan mengintegrasikan beberapa strategi yang saling melengkapi, yang komprehensif, terpadu, dan sesuai dengan kondisi Kabupaten Tasikmalaya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Rekomendasi strategi kebijakan ini dibagi ke dalam lima pilar utama:

1. Pemerataan Akses dan Infrastruktur Pendidikan
 - a. Membangun dan memperbaiki sarana pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
 - b. Menyediakan fasilitas transportasi atau sekolah berbasis asrama (*boarding school*) di daerah dengan akses sulit.
 - c. Mengoptimalkan digitalisasi pendidikan melalui platform daring untuk memperluas akses belajar.
2. Penguatan Dukungan Ekonomi Keluarga
 - a. Memperluas cakupan dan efektivitas program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - b. Memberikan insentif bagi keluarga miskin yang menyekolahkan anaknya hingga jenjang menengah.
 - c. Mengintegrasikan program pendidikan dengan program penanggulangan kemiskinan (PKH, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga).
3. Pencegahan dan Penanganan Putus Sekolah

Rosi Yunita

- a. Meningkatkan layanan bimbingan konseling di sekolah untuk mencegah siswa keluar dari pendidikan formal.
 - b. Mengembangkan program *second chance education* (pendidikan kesetaraan, kursus keterampilan) bagi anak yang sudah putus sekolah.
 - c. Mendorong regulasi yang lebih ketat untuk mencegah perkawinan anak usia dini.
4. Relevansi Pendidikan dengan Dunia Kerja
- a. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri lokal, regional, dan global.
 - b. Memperluas pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
 - c. Mengembangkan program *link and match* agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
5. Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan Pendidikan
- a. Memperbaiki sistem pendataan pendidikan agar akurat, transparan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
 - b. Meningkatkan kapasitas dan distribusi guru melalui rekrutmen, pelatihan, serta insentif yang adil.
 - c. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pendidikan, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.

SIMPULAN

Meningkatkan rata-rata lama sekolah bukan sekadar memperpanjang tahun belajar, tetapi juga memastikan mutu pendidikan yang relevan, berkualitas dan inklusif. Dengan strategi terpadu yang berorientasi pada pemerataan, keberlanjutan, dan relevansi, Kabupaten Tasikmalaya berpeluang besar untuk menyiapkan generasi emas yang cerdas, produktif, dan berdaya saing, sesuai dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya : Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Adil, dan Makmur, dengan Misi : Mewujudkan Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak serta Berbudaya.

Tanpa percepatan dalam peningkatan RLS, Kabupaten Tasikmalaya akan kesulitan memanfaatkan bonus demografi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, rekomendasi strategi kebijakan yang berfokus pada pemerataan akses, dukungan ekonomi, pencegahan putus sekolah, relevansi pendidikan, serta penguatan tata kelola perlu dijalankan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan sehingga Kabupaten Tasikmalaya dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Selanjutnya penting untuk melakukan kolaborasi pemerintah dalam tata kelola pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., & Prayoga, S. (2025). Golden Indonesia Versus Anxious Indonesia: The Direction of Government Policy in Welcoming Golden Indonesia 2045 From The Perspective of Fiqih Syasah. *NUSANTARA: Journal Of Law Studies*, 4(01).
- Anderson, J. E. (2014). *Public Policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Belladonna, A. P., Hidayah, Y., & Triuspita, N. (2023). Responding to The Challenges of The 2045 Golden Generation: Improving a Legal-Aware Golden Generation with a Cultural and Identity Education Approach. *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(2), 868-861.
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson Education.
- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIPP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094-7100.
- Easton, D. (1965). A systems analysis of political life ER.



- Elmi, F., & Librianty, N. (2023). Improving The Quality Of Educational Human Resources To Achieve Indonesia'S Vision 2045. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 11(3), 730-737.
- Hadiningrat, K. S. S., & Silalahi, V. A. J. M. (2024). Efforts to Enhance Excellent Human Resources Towards Golden Indonesia 2045. *JIPOWER: Journal of Intellectual Power*, 1(3), 52-66.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2024/2025. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen.
- Pasaribu, M., Khairifa, F., Ali, R., Muis, A. A., & Ritonga, M. (2024). Youth character building through quality education in realizing golden Indonesia 2045. *Journal of Ecohumanism*, 3(4), 180-192.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. (2025). Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Tasikmalaya. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- Pranita, D., Musthofa, B. M., Kusumastuti, H., & Haidlir, B. M. (2025). Transforming vocational higher education on the path toward Golden Indonesia 2045. *Vocation, Technology & Education*, 2(1).
- Rahmawati, I. (2025). The golden generation 2045 and early childhood education: Between idealism and economic reality. *Policy Futures in Education*, 14782103251320536.
- Rosani, M., Lestari, N. D., & Valianti, R. M. (2025). Transformation of Education to Welcome the Golden Generation Of Indonesia 2045. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 10(1), 407-427.
- Samala, A. D., Rawas, S., Criollo-C, S., Bondarenko, O., Samala, A. G., & Novaliendry, D. (2024). Harmony in Education: An In-Depth Exploration of Indonesian Academic Landscape, Challenges, and Prospects Towards the Golden Generation 2045 Vision. *TEM Journal*, 13(3).
- Syahriani, F., & Ferdi Yufriadi, F. (2023). Empowering The Future: Innovative Education Strategies For Global Skills In The Context Of The Golden Generation 2045. *International Journal of Applied*, 1(2), 121-134.